

346.014
SAR
t c.1

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
SEWA MENYEWA *SAVE DEPOSIT BOX* (SDB)**

**(Suatu Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Semarang)**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

oleh :

ROYEN SARAGI

B4B000180

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

TESIS

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN

SEWA MENYEWA *SAVE DEPOSIT BOX* (SDB)

(Suatu Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang)

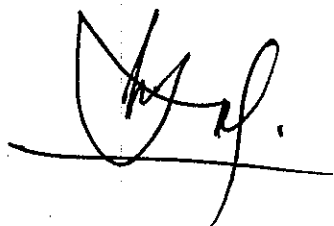
disusun oleh :

ROYEN SARAGI
B4B000180

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 22 December 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

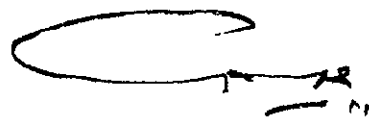
Menyetujui,
Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama

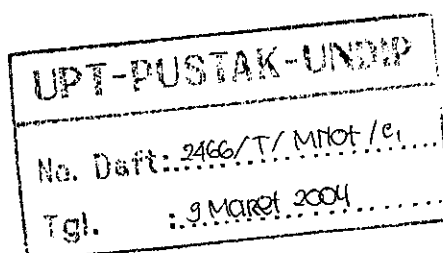


H. ACHMAD BUSRO, SH., MHum

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. SUGANGGA, SH



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang December 2003

Yang menyatakan,

ROYEN SARAGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAVE DEPOSIT BOX* (SDB) (Suatu Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang).”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di

Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **H. Achmad Busro, S.H., MHum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
4. Bapak **Prof. I.G.N. Sugangga, SH** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **R. Suharto, S.H., MHum** selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak **Noor Rahardjo. SH., Mhum.** selaku dosen wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Ibu **Dra. Siti Atika, MM.** selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Semarang dan staf serta para bapak/ibu nasabah sekalian yang telah bersedia menjadi informan/responden dan dengan bersahabat memberi data yang penulis butuhkan. Tanpa bantuan Bapak/Ibu sekalian tesis ini tidak mungkin terwujud.
8. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus

menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
10. Teman-teman mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2000.

Akhirnya untuk istri tercinta dan kedua puteraku tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia mendampingi dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perjanjian pada khususnya.

Semarang, Nopember 2003

Penulis,

ROYEN SARAGI

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN *SAVE DEPOSIT BOX* (SDB) (Suatu Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang) ROYEN SARAGI, SH. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Save Deposit Box (SDB) sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan dalam penitipan yang telah diatur dalam undang-undang, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 10 Tahun 1998 Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Penggunaan *Save Deposit Box* saat ini mulai dipergunakan oleh masyarakat, karena masyarakat membutuhkan adanya perlindungan atas keselamatan dari barang-barang berharga yang dimilikinya. Namun dalam kenyataannya penggunaan akan jasa pelayanan *Save Deposit Box* ini terkadang masih banyak mengalami berbagai kesulitan dan kendala, misalnya banyak masyarakat awam yang masih ragu dan belum percaya atas penggunaan jasa pelayanan *Save Deposit Box* yang ditawarkan oleh Bank.

Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* ini, digunakan pendekatan secara *yuridis empiris* yang didukung dengan data yang kualitatif, kemudian perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* akan di analisa secara deskriptif analitis sehingga diperoleh gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan bahwa :

1. Perjanjian penggunaan *Save Deposit Box* yang dilakukan antara bank dengan nasabah merupakan perjanjian sewa menyewa bukan penitipan dan di PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Semarang, penggunaan *Save Deposit Box* ini masih belum begitu menggembirakan dikarenakan berbagai kendala dalam prakteknya, misalnya masih ada sebagian masyarakat menganggap *Save Deposit Box* belum begitu penting, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang *Save Deposit Box* serta penggunaannya masih pada tingkat masyarakat menengah keatas ;
2. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut melahirkan tanggung jawab antara para pihak, yakni pihak bank dan nasabah yang tertuang dalam klausul-klausul perjanjian yang dibuat secara tertulis ;

ABSTRACT

RESPONSIBILITY THE PARTIES IN AGREEMENT OF TENANCY of SAVE DEPOSIT BOX (SDB) (An study in PT. State Bank Indonesia Tbk. Office Of Branch of Semarang) ROYEN SARAGI, SH.

Save Deposit Box (SDB) as one of the form service activities of banking in depositing which is expressed in section 1 number 14 UU No. 10 year 1998 Change of UU. 7 Year 1992 About Banking, that such with contract or depositing between Public Bank and of depositor with rule of pertinent Public Bank have no right the ownership of of estae.

Usage of *Save Deposit* in this time start to be utilized by society, because society require the existence of protection of safety of valuable goods which owned it. But in reality usage of service of this *Save Deposit Box* sometimes still experiencing of many constraint and difficulties, for example many civil society which still indecisive and not yet trusted of usage of service of *Save Deposit Box* which in offering by Bank.

To know and study more circumstantial about agreement of tenancy of *Save this Deposit Box*, is used approach by *Yuridis* supported *Empiric* with data which qualitative, then agreement of tenancy of *Save Deposit Box* will in analysis descriptively analytical is so that obtained by constructive pictures accurate problems.

From research which have been done, to be obtained by result of conclusion and research that :

1. Agreement usage of done *Save Deposit Box* between bank with client represent agreement of tenancy is not depositing and in PT. BNI Tbk. Branch Semarang, usage of this *Save Deposit Box* still not yet so seethed with excitement because of various constraint in practice, for example there is still some of society assume *Save Deposit Box* not yet important so, still its minim of knowledge of society about *Save Deposit Box* and also its it still at middle society level of upper ;
2. In execution of agreement of the tenancy bear responsibility between the parties, namely bank side and client which is decanted in put in black and white agreement clauses.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sisyimatika Penulisan.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Sewa Menyewa.....	8
2.1.1. Kewajiban Pihak yang Menyewakan.....	8
2.1.2. Kewajiban Penyewa.....	9
2.1.3. Risiko Dalam Sewa Menyewa.....	9
2.2. Pengertian Penitipan.....	10
2.3. Pengertian Lembaga Perbankan.....	11
2.4. Jenis Lembaga Perbankan.....	12
2.5. Tugas Bank.....	13
2.5.1. Tugas Bank Indonesia.....	13
2.5.2. Tugas Bank Umum.....	14
2.6. Kegiatan dan Bidang Usaha Bank.....	14
2.6.1. Kegiatan dan Bidang Usaha Bank Umum.....	14
2.6.2. Kegiatan dan Bidang Usaha Perbankan di Bidang Penitipan dan Pelayanan Jasa.....	17
2.7. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Save Deposit Box..	17
2.7.1. Pengertian Save Deposit Box	20
2.7.2. Keuntungan dari Save Deposit Box	21
2.8. Hubungan Bank dengan Nasabah Dalam Save Deposit Box.....	21
2.8.1. Hubungan Kontraktual Dalam Bentuk Save Deposit Box	21
2.8.2. Hubungan Non Kontraktual.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan.....	27
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3.3. Populasi dan Teknik Sampling.....	29
3.3.1. Populasi.....	29
3.3.2. Teknik Sampling.....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5. Metode Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dasar Konstruksi Hubungan Hukum Pemegang <i>Save Deposit Box</i> Dengan Lembaga Perbankan	32
4.2. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Menggunakan <i>Save Deposit Box</i> Sebagai Salah Satu Jasa Pelayanan Perbankan dalam Hal Adanya <i>Overmach</i>	38
4.3. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pelayanan <i>Save Deposit Box</i> di Lembaga Perbankan.....	50
4.3.1. Pemecahan yang Dapat Dilakukan Apabila Menghadapi Kendala Dalam Pelaksanaan Penggunaan <i>Save Deposit Box</i> di Lembaga Perbankan	52
4.3.2. Manfaat yang Diperoleh dan Prospeknya Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Pelayanan <i>Save Deposit Box</i> di Lembaga Perbankan.....	54
4.3.2.1. Manfaat yang Diperoleh Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Pelayanan <i>Save Deposit Box</i> di Lembaga Perbankan.....	54
4.3.2.2. Prospeknya Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Pelayanan <i>Save Deposit Box</i> di Lembaga Perbankan.....	56

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran-saran.....	59

RINGKASAN.....	60
-----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang penting peranan dan fungsinya dalam sektor ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan bank (*Bank Financial Institution*) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta pelayanan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat. Bank juga dalam perkembangannya berfungsi sebagai perantara, pelindung akan barang-barang berharga dan keuangan milik masyarakat.

Menurut Yeager dan Seitz dalam Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, lembaga keuangan mempunyai 4 (empat) peran, yaitu : ¹

1. Transmutasi aset (*Asset transmutation*) ;
2. Likuiditas (*Liquidity*) ;
3. Realokasi pendapatan (*Income reallocation*) ;
4. Transaksi keuangan (*Finance transaction*).

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

Ada 7 (tujuh) alasan yang menyebabkan meningkatnya peran dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan, sebagaimana dikatakan Dahlan Siamat dalam Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, yaitu : ²

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat ;
2. Perkembangan industri dan teknologi ;
3. Satuan nilai instrumen keuangan ;
4. Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan ;
5. Beban biaya likuiditas ;
6. Keuntungan jangka panjang ;
7. Resiko lebih kecil.

Secara garis besar lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ³

Oleh karena untuk peningkatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa-jasa yang diberikan selain penyaluran pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi dan program

² *Ibid*, hlm. 13-15.

³ Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 9.

pensiun, maka pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh lembaga perbankan semakin lama semakin meningkat dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi tuntutan zaman.

Peningkatan pelayanan jasa-jasa yang diberikan oleh bank saat ini antara lain : *Travellers Cheque*, *Banknote*, *Credit Card*, Bank Garansi, Penanggung di Bidang Penerbitan Obligasi, *Save Deposit Box*, Penjamin Emisi Efek (*Underwriting*) dan pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya. Salah satu diantara pelayanan jasa-jasa perbankan saat ini yang sering dipergunakan oleh masyarakat demi perlindungan dan keamanan barang-barang berharga miliknya adalah apa yang dinamakan *Save Deposit Box* (SDB).

Adapun yang dimaksud dengan *Save Deposit Box* adalah box yang dilengkapi dengan ruangan tahan api dengan ukuran-ukuran tertentu yang disediakan oleh Bank untuk kepentingan masyarakat guna menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat berharga miliknya untuk jangka waktu tertentu, *Save Deposit Box* memiliki dua macam kunci, satu macam kunci sebagai *master key* dipegang oleh Bank, sedangkan satu macam lagi yang terdiri dari seperangkat (dua) anak kunci dipegang oleh nasabah dan hanya dibuka dengan dua macam anak kunci tersebut.⁴

Save Deposit Box sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan dalam penitipan telah diatur dalam undang-undang, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 10

⁴ Kantor Besar PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Pusat

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan : "Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut." ⁵

Namun dalam prakteknya antara PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Semarang dengan nasabah/masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa *Save Deposit Box* ini yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya menggunakan istilah perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box*. ⁶ Melihat kenyataan yang ada dalam praktek penggunaan istilah penitipan dalam undang-undang perbankan, kiranya kurang tepat.

Tolak ukur dari keberhasilan atau kegagalan suatu bank dalam memberikan pelayanan jasa *Save Deposit Box* kepada masyarakat secara langsung dapat dinilai dari kemampuan bank untuk memberikan pelayanan jasa penitipan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya *Save Deposit Box* disediakan dalam ukuran-ukuran tertentu. Kerahasiaan mengenai nasabah atau penyewa, mutasi dan isinya dijaga ketat oleh Bank, keamanan tiap box terlindungi oleh sistem dan perlengkapan yang sangat terpercaya serta sistem pengamanan

⁵ Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, *Op. cit*, hlm. 11.

⁶ Dapat dilihat pada form perjanjiannya dalam lampiran.

dilaksanakan 24 jam penuh, sehingga terjamin perlindungan dan keamanannya.

Penggunaan *Save Deposit Box* saat ini mulai dipergunakan oleh masyarakat, karena masyarakat membutuhkan adanya perlindungan atas keselamatan dari barang-barang berharga yang dimilikinya.⁷

Kenyataan di atas, menunjukkan bahwa semakin banyaknya masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap keamanan uang dan barang-barang berharga milik mereka. Oleh karena itu bank sebagai salah satu bentuk usaha yang dipilih dan terpercaya untuk menyimpan barang-barang berharga milik masyarakat hendaknya meningkatkan jasa pelayanannya terhadap masyarakat, khususnya dalam memberikan fasilitas jasa pelayanan *Save Deposit Box*.

Bank menawarkan fasilitas pelayanan jasanya dalam bentuk *Save Deposit Box* adalah sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan dan keamanan atas keselamatan dari barang-barang berharga yang dimilikinya. Namun dalam kenyataannya penggunaan akan jasa pelayanan *Save Deposit Box* ini terkadang masih mengalami berbagai kesulitan atau hambatan, misalnya masih banyak masyarakat awam yang masih ragu dan belum percaya atas penggunaan jasa pelayanan *Save Deposit Box* yang ditawarkan oleh bank, mereka masih takut dan ragu jika

⁷ Hasil pra survey pada Kantor PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Semarang pada Tanggal 18 Agustus 2003.

barang-barang berharga milik mereka yang disimpan atau dititipkan pada bank akan hilang/rusak jika terjadi kebakaran atau sebab-sebab lainnya.⁸

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang mendasari konstruksi hubungan hukumnya pemegang *Save Deposit Box* dengan lembaga perbankan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam menggunakan *Save Deposit Box* sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan dalam hal adanya *overmach* ?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggunaan jasa pelayanan *Save Deposit Box* di lembaga perbankan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui konstruksi hubungan hukum antara pemegang *Save Deposit Box* dengan lembaga perbankan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank dengan nasabah dalam menggunakan *Save Deposit Box* sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggunaan jasa pelayanan *Save Deposit Box* di lembaga perbankan.

⁸ *Ibid*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bersifat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Perbankan dalam memberikan dan meningkatkan jasa pelayanannya kepada masyarakat secara umum dan khususnya pelayanan jasa penggunaan *Save Deposit Box* sebagai salah satu jasa perbankan.

2. Bersifat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna, membantu dan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari ; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, terdiri dari ; Pengertian Sewa Menyewa, Pengertian Penitipan, Pengertian Lembaga Perbankan, Jenis Lembaga Perbankan, Tugas Bank, Kegiatan dan Bidang Usaha Bank, Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya *Save Deposit Box*, Hubungan Bank dengan Nasabah dalam *Save Deposit Box*.
- BAB III** : Metode Penelitian, terdiri dari ; Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Teknik Sampling, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari ; Dasar Konstruksi Hubungan Hukum Pemegang *Save Deposit Box* dengan Lembaga Perbankan, Tanggungjawab para Pihak dalam Menggunakan *Save Deposit Box* Sebagai Salah Satu Jasa Pelayanan Perbankan dalam Hal Adanya *Overmach*, Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pelayanan *Save Deposit Box* di Lembaga Perbankan.
- BAB V** : Penutup, yang terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam Bab Ketujuh dari Buku III KUH Perdata berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena "waktu tertentu" bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.

2.1.1. Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Kewajiban pihak yang menyewakan tanpa perlu adanya suatu janji untuk itu adalah :⁹

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa ;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan ;

⁹ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*. Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm. 143.

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

2.1.2. Kewajiban Penyewa

Bagi si penyewa ada dua kewajiban utama, yaitu : ¹⁰

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik (*als goed huisvader*), sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya atau bila tidak ada suatu perjanjian mengenai hal itu menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan ;
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian.

2.1.3. Risiko Dalam Sewa Menyewa

Berkenaan dengan hal ini, ketentuan dalam Pasal 1553 KUH Perdata menyatakan, sebagai berikut :

1. Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum ;
2. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa atautkah ia akan meminta, bahkan pembatalan perjanjian sewa tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu ia berhak atas suatu ganti rugi.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 145.

Walaupun peraturan resiko dalam sewa menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh Pasal 1553 KUH Perdata tersebut, namun dapat berlaku sama dalam perjanjian sewa menyewa *Save Defosit Box* antara bank dengan nasabah.

2.2. Pengertian Penitipan

Pengertian atau definisi mengenai penitipan dalam perbankan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.¹¹

Menurut Pasal 1694 KUHPdata "Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama", dan menurut Pasal 1698 KUHPdata "Penitipan barang terjadi secara sukarela atau secara terpaksa", dan menurut Pasal 1699 KUHPdata " Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan".

Selanjutnya dalam hal penitipan ini bagi Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa di bidang penitipan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang No.

¹¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan, Lo. cit.*

10 Tahun 1998 : bahwa usaha Bank Umum meliputi melakukan kegiatan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

Bank Umum bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. Sedang dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang ditiptkan pada bank tersebut tidak termasuk dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

2.3. Pengertian Lembaga Perbankan

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan negara.¹²

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi bank, maka akan diketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Itali "Banca" yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Oleh karena pada waktu itu pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹³

Di samping itu ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan

¹² Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta, hlm. 16.

¹³ Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 80.

menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank note*. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas dan lain-lain.¹⁴

Adapun menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.4. Jenis Lembaga Perbankan

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

- a. Bank Umum dan ;
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota West Publishing Co., USA, 1968, 184.

Ad). a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ad). b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.5. Tugas Bank

2.5.1. Tugas Bank Indonesia

Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada diluar pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis, bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Bank Indonesia menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : ¹⁵

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

2.5.2. Tugas Bank Umum

Tugas Bank Umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.

2.6. Kegiatan dan Bidang Usaha Bank

2.6.1. Kegiatan dan Bidang Usaha Bank Umum

Sebagaimana telah dikemukakan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan bank umum adalah

¹⁵ Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2000, hlm. 6.

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan pokok dari suatu Bank Umum adalah sebagai berikut : ¹⁶

1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain ;
2. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit ;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang ;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan dan atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :
5. Surat-surat wesel ;
 - a. Surat Pengakuan Hutang atau kertas dagang lainnya ;
 - b. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - d. Obligasi ;
 - e. Surat dagang berjangka waktu sampai maksimum 1 (satu) tahun ;
 - f. Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
6. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah ;
7. Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana pada atau dari bank lain dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen-instrumen lainnya ;
8. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
9. Menyediakan tempat (*Save Deposit Box*) untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
10. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak) ;
11. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah yang lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada Bursa Efek ;

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)* Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 6-8.

12. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan ;
13. Melakukan kegiatan *factoring*, usaha kartu kredit dan wali amanat ;
14. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dan ;
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust dan lain-lain).

Di samping kegiatan utama seperti tersebut di atas, maka menurut sistem Undang-Undang Perbankan, suatu Bank Umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing ;
2. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan ;
3. Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit ;
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Pada prinsipnya suatu kegiatan bank terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok sebagai berikut : ¹⁷

1. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat ;
2. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat ;
3. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8

2.6.2. Kegiatan dan Bidang Usaha Perbankan di Bidang Penitipan dan Pelayanan Jasa

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bank sebagai penghimpun dana masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa-jasanya yang ditawarkan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu bank dalam menghimpun dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat sangat dipengaruhi oleh jasa apa yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Suatu bank bisa lebih menyenangkan dan menjadi pilihan bagi nasabah daripada bank lain, karena terdapatnya berbagai jasa yang ia tawarkan atau yang dapat dikerjakan olehnya demi kepuasan nasabah. Keberanekaragaman jasa tentu akan lebih menarik dan menyenangkan banyak orang daripada bank yang hanya melayani satu atau dua jasa perbankan saja. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai usaha perbankan yang memberikan pelayanan jasa di bidang penitipan barang dan surat-surat berharga milik masyarakat dalam bentuk perjanjian pemakaian *Save Deposit Box* (SDB).

2.7. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya *Safe Deposit Box*

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yaitu dengan melakukan segala usaha. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan penawaran/pelayanan jasa kepada

masyarakat. Hal tersebut telah dilakukan sejak dahulu. Salah satu penawaran/pelayanan jasa yang diberikan adalah Kotak Pengaman Simpanan (*Save Deposit Box*). *Save Deposit Box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk bank menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut (*Save Deposit Box*)¹⁸.

Save Deposit Box tersebut merupakan salah satu bentuk jasa tertua perbankan. Walaupun masih ada sekarang namun pelayanan ini jauh sekali bedanya dengan jasa-jasa perbankan lainnya yang lebih kita kenal seperti menerima deposito, membayar cek dan memberi kredit, ketiganya menggunakan uang (dalam bentuk uang). Karena jika dalam bentuk uang, maka antara uang yang satu dengan yang lain nilainya sama dan tidak ada hubungan apapun yang terdapat antara uang yang disetorkan senilai dengan uang yang akhirnya diambil. Lain halnya jika kita menyimpan dalam bentuk suatu polis asuransi atau sebuah cincin berlian dalam kotak pengaman simpanan (*Save Deposit Box*) adalah permintaan dari masyarakat yang menginginkan jenis perlindungan ini untuk milik mereka yang paling berharga, hal ini adalah merupakan kecenderungan bank-bank untuk memberikan pelayanan perbankan yang lengkap kepada para pemegang rekening. Karena kunci utama dari dulu sampai saat ini dalam pemberian pelayanan tersebut adalah terletak pada perlindungan dan keamanan. bahwa

¹⁸Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia. Jakarta. 1990.hal.61.

setiap bank yang menawarkan jasa kotak pengaman simpanan (*Save Deposit Box*) harus menyadari sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban mereka. Sehingga hal ini dapat menjamin kepentingan masing-masing antara bank dengan nasabah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan di segala bidang, peranan Perbankan saat ini semakin ditingkatkan terutama dalam hal efisiensi, efektivitas dan mutu pelayanannya. Dari hal tersebut peningkatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga dalam rangka persaingan pemasaran produk/jasa-jasa perbankan yang dihasilkan dalam hubungannya dengan perkembangan sistem dan teknologi pengelolaan bank.

Save Deposit Box sebagai salah satu jasa perbankan yang memberikan fasilitas pelayanan penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga, dirasa semakin dibutuhkan keberadaannya terutama bagi masyarakat yang menginginkan terjaminnya keamanan penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang dimiliki.

Sejak mulai dikenalnya kegiatan perbankan, seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat memacu proses kreatifitas dalam dunia perbankan untuk melahirkan produk-produk jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Produk jasa yang lahir sebagai suatu pemenuhan dari kebutuhan masyarakat tersebut antara lain produk jasa berupa *Safe Deposit Box*. *Safe Deposit Box* terinspirasi dari kegiatan yang serupa yang dilakukan oleh

tukang mas dimasa lampau, yaitu menerima dan menyimpan serta menjaga keamanan logam berharga dan benda-benda berharga lainnya.

Safe Deposit Box merupakan jalan keluar dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan atas keselamatan dari barang-barang berharga yang dimilikinya, memang hal tersebut merupakan pelayanan yang dipromosikan dalam *Safe Deposit Box* oleh dunia perbankan.

2.7.1. Pengertian *Save Deposit Box*

Menurut menurut Kamus Umum Lengkap Inggris –Indonesia pengertian *Save* adalah "menyelamatkan, mengelakkan, menyimpan, menghemat"¹⁹. *Deposit* adalah : menyimpan²⁰ sedangkan *Box* adalah : peti atau kotak²¹. Jadi secara umum *Save Deposit Box* diartikan sebagai kotak yang aman tempat penyimpanan.

Adapun yang dimaksud dengan *Save Deposit Box* adalah box yang dilengkapi dengan ruangan tahan api dengan ukuran-ukuran tertentu yang disediakan oleh Bank untuk kepentingan masyarakat guna menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat berharga miliknya untuk jangka waktu tertentu

¹⁹Saodah Nasution. *Kamus Umum Lengkap*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.1989.hal 222

²⁰*Ibid*. hal.68

²¹*Ibid* .hal.27

Sebagai salah satu dari bentuk jasa pelayanan perbankan *safe deposit box* digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda berharga milik nasabah yang menjadi pelanggan jasa *Save Deposit Box*.

2.7.2. Keuntungan dari *Save Deposit Box*

Save Deposit Box memberikan keuntungan kepada nasabah yang memiliki benda-benda berharga berupa jaminan keamanan dari kemungkinan hilang atau musnahnya benda-benda berharga miliknya, disamping itu sistim *Save Deposit Box* juga menjamin kerahasiaan dari nasabah/konsumen penggunaanya.

2.8. Hubungan Bank Dengan Nasabah Dalam *Safe Deposit Box*

Dari segi kacamata hukum hubungan antara bank dengan nasabah dalam *safe deposit box* terdiri dari dua bentuk, yaitu : ²²

2.8.1. Hubungan Kontraktual Dalam Bentuk *Safe Deposit Box*

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah non debitur dan non deposan. Hubungan kontraktual bank dengan nasabah *Save Deposit Box* biasanya dilakukan selalu secara tertulis.

Langkah-langkah yang diambil dalam membuat kontrak *Save Deposit Box* sebagai hubungan kontraktual terdiri dari :

²² Munir Fuady, *Op. cit.* hlm. 102.

1. Kontrak Perseorangan

Kontrak perseorangan ini biasanya diadakan dengan : ²³

- a. Mengidentifikasi penyewa ;
- b. Menyuruh penyewa menandatangani formulir kontrak-kontrak bank ;
- c. Meminta contoh (spesimen) tanda tangannya.

Nasabah *Save Deposit Box* dapat menunjuk seorang wakil yang diizinkan membuka kotak itu sebagai wakilnya yang sah. Sebaiknya kedua orang ini yaitu nasabah dan wakilnya hadir waktu menandatangani formulir pada bank itu. Kehadiran ini diperlukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Kontrak Penyewa Bersama

Kebanyakan bank menyediakan formulir kontrak penyewa bersama yang di dalamnya berisi pemberian hak mengenai dapat atau tidaknya membuka kotak itu kepada yang masih hidup. Hal demikian haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun hak untuk membuka/memasuki ini tidak berarti bahwa hak milik atas harta dalam kotak itu beralih pada yang hidup pada saat meninggalnya salah seorang penyewa itu. Dengan jalan apapun bagi bank dan wakilnya tidak dapat memungkinkan adanya transfer kepemilikan jika salah seorang dari pihak-pihak itu meninggal dunia dalam suatu kontrak penyewa bersama.

²³ A. Hasymi Ali, *Dasar-dasar Operasi Bank (Terjemahan American Institute of Banking)*. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hl.m 340.

3. Bentuk-bentuk Kontrak yang Lain

Save Deposit Box dapat pula disewa oleh Firma, Perseroan, Fidusier dan lain-lain dan prosedur umumnya sama. Wewenang dari mereka yang melaksanakan kontrak ini atas nama Firma, Perseroan, *Beneficiary* dan sebagainya haruslah ditentukan, demikian pula identitas dari orang-orang yang berhak membukanya serta tanda tangan-tanda tangan yang diperoleh hendaknya diperiksa atau disahkan hal tersebut agar bagi mereka yang dikuasakan dapat membuka *Save Deposit Box* itu.

2.8.2. Hubungan Non Kontraktual

Selain hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan di atas, ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah terutama dengan nasabah deposan dan nasabah non deposan-non debitur, ada 6 (enam) jenis hubungan hukum, yakni : ²⁴

1. Hubungan Fidusia (*Fiduciary relation*) ;
2. Hubungan Konfidensial ;
3. Hubungan Bailor-Bailee ;
4. Hubungan Principal-Agent ;
5. Hubungan Mortgagor-Mortgagee dan ;
6. Hubungan Trustee-Beneficiary.

Akan tetapi berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengatur hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk

²⁴ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 104.

hal tersebut. Misalnya, dalam hal bank memberikan penyewaan *Save Deposit Box* yang dalam hal ini akan bertindak sebagai pihak “Penerima Titipan” dari nasabahnya atau sebagai pihak “Yang Menyewakan” *Save Deposit Box* tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian.²⁶

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁷ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.²⁸

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.²⁹ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

²⁶ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 9.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³⁰

Dalam metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.³¹

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan mengkombinasikan hasil dari data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dengan data sekunder untuk menemukan dasar hukum/aturan dalam perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* antara Bank dengan Nasabah sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan.

Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang permasalahan yang diteliti, antara lain :

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 9.

1. Buku ke III KUH Perdata khususnya tentang perjanjian.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³² Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif (KUH Perdata , khususnya mengenai perjanjian sewa menyewa) dan Hukum Perbankan.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek penetapan prosedur perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* pada lembaga perbankan serta hak dan tanggung jawab para pihak apabila obyek atau barang yang dititipkan pada *Save Deposit Box* Bank tersebut musnah atau hilang.

³² Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 10.

3.3. Populasi dan Teknik Sampling

3.3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.³³

Populasi dalam penelitian tesis ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tesis, yaitu Lembaga Perbankan di Semarang yang melakukan penjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* sebagai jasa pelayanan bank kepada nasabah. Populasi ini sudah diketahui jumlahnya, yakni bank-bank yang ada di Semarang dan nasabah selaku penyewa dari *Save Deposit Box*.

Dari jumlah populasi bank-bank yang ada di Kota Semarang tersebut, karena adanya kesamaan dalam sistem pelayanan kerja terhadap masyarakat sebagai nasabah dan tidak ada perbedaan yang signifikan, maka hanya diambil 1 (satu) bank sebagai sampel untuk penelitian ini yaitu :

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang.

3.3.2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Dilakukan dengan cara telah memilih

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 44.

sampel yang akan diteliti, yakni bank dan nasabah yang mengadakan perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* :

1. PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Semarang ;
2. Nasabah sebanyak 30 orang, untuk nasabah ini diambil sampel dengan cara *insidental* pada waktu penelitian dilakukan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara/*interview* dan angket/*questionere*.³⁴ Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan pada pimpinan bank atau bagian yang menangani *Save Deposit Box* dari bank tersebut yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini dan beberapa orang nasabah sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara telah ditentukan lebih dahulu, dengan membuka kemungkinan pengembangan pertanyaan berdasarkan keadaan wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai informan/responden guna melengkapi

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

analisis terhadap permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pimpinan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Semarang.
2. Nasabah.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁵

3.5. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna mencari dan menemukan hubungan anatara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberi gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Analisis kualitatif dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pertama : reduksi data, kedua : penyajian data dan ketiga : penarikan kesimpulan (verifikasi).³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 11.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 250.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Loc. cit*, hlm. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dasar Konstruksi Hubungan Hukum Pemegang *Save Deposit Box* dengan Bank

Save Deposit Box adalah box yang dilengkapi dengan ruangan tahan api dengan ukuran-ukuran tertentu yang disediakan oleh bank untuk kepentingan masyarakat guna menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat berharga untuk jangka waktu tertentu, memiliki dua macam kunci yang satu macam kunci sebagai master key dipegang oleh bank, sedangkan satu macam lagi yang terdiri dari seperangkat (dua) anak kunci dipegang oleh nasabah dan hanya dibuka dengan dua macam anak kunci tersebut.

Save Deposit Box ditawarkan pada masyarakat, karena semakin dibutuhkan suatu fasilitas yang memberikan jaminan keamanan terhadap penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan tanggapan masyarakat selaku nasabah dengan dikeluarkannya atau diadakannya pelayanan jasa *Save Deposit Box* sebagai salah satu dari jasa perbankan tersebut menurut mereka yang dipilih sebagai sample, sebagian besar diketahui bahwa tanggapan masyarakat ada yang positif juga ada yang negatif, senang dan banyak meminta informasi.³⁸ Namun menurut pihak Bank Negara Indonesia (BNI) sendiri, bahwa

³⁸ Hasil wawancara dengan para nasabah pada Kantor BNI Cabang Semarang pada Tanggal 13 Oktober 2003.

khususnya di Kota Semarang masih belum menggembirakan bagi BNI karena masyarakat menganggap bahwa kebutuhan *Save Deposit Box* masih belum begitu mendesak/penting.³⁹

Untuk itu agar dapat lebih memasyarakatkan penggunaan *Save Deposit Box* dilakukan usaha menurut cara yang dimiliki oleh masing-masing bank. Dari pihak bank BNI yang dipilih sebagai sample menggunakan cara yang sama dengan bank-bank yang lain, yaitu dengan mengeluarkan/menyebarkan brosur-brosur. Namun tanggapan/image masyarakat terhadap masing-masing bank berbeda karena bergantung pada cara dan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank begitu pula cara bank sendiri dalam menanggapi tanggapan/image masyarakatpun terdapat perbedaan yaitu melalui sistem pelayanan yang berbeda antara bank yang satu dengan yang lain. Sehingga dalam rangka pelayanan yang baik menurut Pemimpin Bank Negara Indonesia Cabang Semarang, bank harus berusaha agar produk-produk yang diberikan kepada nasabah-nasabahnya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan tidak boleh mengandung kesalahan sama sekali.⁴⁰

Namun dalam kenyataannya tentu sulit sekali karena berhubungan pada unsur manusianya sendiri, yang dalam hal ini adalah para karyawan bank dapat dikatakan bahwa bank perlu memberikan pelajaran dan latihan kepada karyawan-karyawannya tentang cara melayani nasabah dengan baik.

³⁹ Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang pada Tanggal 13 Oktober 2003.

⁴⁰ *Ibid*

Hal tersebut dalam rangka memberikan mutu pelayanan yang baik bagi nasabah. Dengan adanya mutu pelayanan yang baik maka dari bank itu sendiri dapat menarik banyak nasabah, sehingga akan diperoleh dana yang dibutuhkan bagi kelancaran operasional bank.

Perkembangan produk/jasa perbankan akan semakin meningkat penggunaannya bersamaan dengan pesatnya perkembangan di sektor industri dan sektor lainnya. Sehingga untuk mengimbangi keadaan tersebut mendorong dunia perbankan untuk memperbaiki dirinya masing-masing, baik dengan cara memperkuat modal, meningkatkan profesionalisme pimpinan dan karyawannya, memperbaiki organisasi dan tata kerja maupun upaya-upaya lainnya, termasuk dalam hal menawarkan/memasarkan produk/jasa perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan zaman saat ini.

Save Deposit Box (SDB) sebagai salah satu jasa perbankan dalam hal penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga milik nasabah (penyewa), seperti yang tercantum *Save Deposit Box* merupakan jasa perbankan yang ditujukan untuk menunjang salah satu Program Pemerintah di bidang Perbankan dalam hal pengamanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga baik untuk Warga Negara Indonesia sendiri maupun tamu asing.

Bahwa pihak BNI mempunyai latar belakang yang sama dengan bank-bank yang lain dalam hal penggunaan SDB yang ditawarkan pada masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu fasilitas yang

memberikan jaminan keamanan terhadap penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang dimiliki. Masalah hukum juga banyak berkaitan dengan kegiatan operasional bank, terutama dalam hal pelayanan jasa perbankan khususnya mengenai *Save Deposit Box*. Undang-undang atau peraturan hukum yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan *Save Deposit Box*, antara lain :

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang meliputi pasal-pasal :

a. Pasal 1 angka 14 : bahwa penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

b. Pasal 6 huruf h dan huruf i :

Huruf h : menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

Huruf i : melakukan kegiatan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

c. Pasal 9 :

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

(3) Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada Bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Dalam Pasal 6 huruf (h) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan : “Bahwa bank menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga” dan merupakan salah satu fasilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Perjanjian Kontrak *Save Deposit Box* merupakan bentuk perjanjian sewa menyewa, dimana terdapat pihak bank sebagai pelayan jasa yang menyewakan tempat *Save Deposit Box* dan nasabah/konsumen yang menggunakan jasa tempat *Save Deposit Box* tersebut. Sebagai bentuk perjanjian sewa menyewa maka terhadap pihak pemberi sewa dan pihak penyewa terikat dalam ketentuan sewa menyewa yang terhadap masing-masing memiliki hak dan tanggungjawab.

Untuk lebih memasyarakatkan penggunaan *Save Deposit Box* (SDB), maka pihak bank melakukan usaha promosi menurut cara yang dimiliki oleh masing-masing bank antara lain dengan mengeluarkan/menyebarkan brosur-brosur, seperti yang dilakukan oleh BNI, dalam hal ini bukan hanya untuk penyewa tetapi juga nasabah pada umumnya dengan tujuan agar dapat lebih memperbaiki dan meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan, khususnya penggunaan SDB.

Hal tersebut dilakukan pada dasarnya adalah agar masyarakat lebih dapat menyadari kegunaan/manfaat penggunaan SDB untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang. Sedangkan yang menjadi tujuan BNI pada umumnya mempunyai tujuan yang sama dengan bank-bank yang lain, yaitu bahwa bank dapat menjamin keamanan penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang dimiliki oleh nasabah (penyewa) agar terhindar dari kerusakan dan pencurian. Selain itu juga bagi pihak bank sendiri dapat memperoleh tambahan dana yang dapat menambah likuiditasnya dari hasil uang sewa yang diperoleh. Sedangkan untuk uang jaminan dapat diperoleh atas kerusakan/hilangnya kunci SDB oleh nasabah (penyewa).

Sehingga dari data yang diperoleh di atas penulis berpendapat bahwa peningkatan mutu pelayanan oleh masing-masing bank termasuk pihak BNI sangat dibutuhkan, hal tersebut agar masyarakat dapat lebih merasakan manfaat atas penggunaan masing-masing produk yang ditawarkan oleh bank. Untuk itu hendaknya pada semua lembaga perbankan bank mempunyai suatu program formal peningkatan mutu atau merencanakan program tersebut bagi pengembangan mutu terutama mutu aktivitas jasanya dalam hal ini pada pelayanan jasa SDB, sehingga dalam penggunaannya diharapkan agar dapat lebih efektif dan efisien.

4.2. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Menggunakan *Save Deposit Box* Sebagai Salah Satu Jasa Pelayanan Perbankan Dalam Hal Adanya *Overmacht*

Mengenai pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam hal ini, antara bank dengan nasabah dalam menggunakan *Save Deposit Box* sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan terdapat beberapa tahap yang dilakukan agar dalam proses pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat berjalan dengan baik antara bank dengan nasabah. Beberapa tahap itu meliputi prosedur untuk menjadi nasabah *Save Deposit Box*, syarat-syarat menyewa *Save Deposit Box*, ketentuan-ketentuan penyewaan *Save Deposit Box* (Hak dan kewajiban yang timbul antara Bank dengan Nasabah) dan proses pengakhiran penyewaan *Save Deposit Box*. Menurut Pimpinan BNI Kantor Cabang Semarang dapat diketahui, bahwa dalam tahap-tahap pelaksanaan hubungan dan tanggung jawab tersebut terdapat persamaan dan perbedaan satu sama lain. antara lain : ⁴¹

1. Prosedur Untuk Menjadi Nasabah *Save Deposit Box*

Untuk prosedur menjadi nasabah *Save Deposit Box* pada BNI, pada dasarnya hampir memiliki kesamaan prosedur dengan bank-bank lain, yaitu :

1. Menandatangani formulir surat perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box*

⁴¹ *Ibid*

2. Menandatangani lembar specimen tanda tangan (lembar contoh tanda tangan)
3. Mengisi dan menandatangani lembar surat kuasa (jika ada yang dikuasakan).

2. Ketentuan-ketentuan Penyewaan *Save Deposit Box* (Hak dan Kewajiban yang Timbul antara Bank dengan Nasabah)

Di samping prosedur dan syarat-syarat penyewaan *Save Deposit Box* di atas, terdapat pula ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para nasabah di dalam melakukan perjanjian penyewaan *Save Deposit Box*, sehingga timbul hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah, antara lain :

1. Hak dari Bank adalah :

- a. Penyewa tunduk/mengikat diri terhadap syarat-syarat umum bagi para pemegang rekening bank berikut syarat-syarat tambahannya yang akan disusulkan dan atau ditetapkan kemudian.
- b. Penggunaan *Save Deposit Box* (SDB) oleh penyewa (nasabah) dan atau kuasanya yang sah, setelah mengisi formulir permintaan pembukaan SDB yang disediakan oleh bank, hanya dapat dilakukan pada hari-hari dan jam-jam kerja dengan bantuan petugas bank, untuk membuka SDB-nya setelah penelitian tanda tangan.

Bank dapat memperkenankan masuk kuasa dan atau ahli waris penyewa yang sah masuk ke ruang khasanah dengan pembatasan tidak lebih dari 2 (dua) orang untuk setiap penyewa. Bank dalam hal

luar biasa menurut pertimbangannya dapat membatasi jam-jam izin masuk ke khazanahnya, bahkan untuk menutup khazanahnya sama sekali.

2. Hak dari Nasabah (penyewa) adalah :

- a. Penyewa berhak menggunakan *Safe Deposit Box* yang disediakan oleh bank khusus untuk menaruh/menyimpan dan mengambil efek-efek, akta-akta dan surat berharga lainnya serta batu permata, logam-logam mulia dan barang-barang lainnya, kecuali barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Penyewa atas permintaan bank harus dapat membuktikan sendiri, bahwa dalam SDB yang disewa tidak terdapat barang-barang lain selain daripada yang telah disebutkan di atas.

- b. Penyewa pada saat penandatanganan perjanjian ini menerima 2 (dua) buah kunci No dari SDB No..... untuk dipergunakan oleh penyewa selama bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan perjanjian ini sekaligus merupakan tanda bukti penerimaan kunci dimaksud.

3. Kewajiban dari Bank adalah :

- a. Penyewa dijamin bahwa bank akan memenuhi kewajibannya untuk selalu mengurus penguncian dari gedungnya dengan baik, akan tetapi penyewa tidak berhak untuk menuntut atas kerugian yang lain yang bukan merupakan akibat langsung daripada penunaian

kewajiban ini. Oleh karenanya bank tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan kerugian yang disebabkan sehubungan penyelesaian dalam hal tidak mengosongkan SDB menurut waktu yang telah diperjanjikan, perampokan atau penyerbuan dengan atau tidak bersamaan dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan terhadap orang-orang yang bekerja untuknya.

- b. Bank akan membuatkan kunci baru atas beban penyewa terhadap kunci yang hilang (tidak berada dalam penguasaannya).

4. Kewajiban dari Nasabah (Penyewa) adalah :

- a. Penyewa dibebani sewa dan setoran jaminan sesuai dengan tarif yang berlaku di bank yang pembayarannya, dilakukan dimuka sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perjanjian dimaksud ditetapkan minimum 3 (tiga) bulan. Penyewa diwajibkan mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh bank untuk pengurusan SDB serta mengganti segala kerugian yang diderita oleh bank yang disebabkan karena penyewaan ini.
- b. Penyewa harus menyimpan 2 (dua) buah kunci dimaksud dengan baik dan apabila kunci tersebut hilang, dicuri atau karena apapun juga yang mengakibatkan kunci tersebut tidak lagi berada dalam penguasaannya, maka penyewa harus segera melaporkan hal tersebut kepada bank.
- c. Penyewa apabila menunjuk orang lain bertindak untuk dan atas namanya, maka harus membuat surat kuasa yang formulirnya telah

disediakan oleh bank dan ditandatangani oleh penyewa di atas materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segala sesuatu yang terjadi akibat surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penyewa, bank dibebaskan dari tanggung jawab ini.

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perjanjian penyewaan

Save Deposit Box tersebut, adalah :

- a. Penyewa dan bank dapat memperpanjang perjanjian tersebut setiap kali dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga sewa dan setoran jaminan sesuai dengan tarif yang berlaku di bank.

Penyewa apabila berkehendak untuk memperpanjangnya, maka selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari kerja sebelum perjanjian berakhir, bank harus sudah menerima surat pemberitahuan perpanjangan dari penyewa disertai dengan jangka waktu perpanjangan yang dikehendaknya. Dengan disetujuinya permintaan perpanjangan tersebut, penyewa harus memenuhi segala kewajibannya yang ditentukan oleh bank selambat-lambatnya pada akhir berlakunya perjanjian ini. Jika kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi, maka dianggap tidak ada perpanjangan dan perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktunya. Sedang mengenai proses perpanjangan kontrak *Save Deposit Box* (SDB) bagi nasabah yang telah jatuh waktu adalah :

- Bank/petugas *Save Deposit Box* menghubungi nasabah yang kontrak *Save Deposit Box* nya telah jatuh waktu melalui pesawat

telepon/surat yang sifatnya memberi/mengingatkan nasabah yang bersangkutan agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Surat Perjanjian Sewa Menyewa *Save Deposit Box*.

- Hal ini dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum tanggal jatuh waktu.
- b. Penyalahgunaan kunci *Save Deposit Box* dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyewa.
- c. Surat Perjanjian Sewa Menyewa *Save Deposit Box* dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar asli bermaterai cukup untuk bank dan lembar lainnya untuk penyewa yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lainnya merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian tersebut.
- d. Mengenai surat perjanjian tersebut dan segala akibatnya, bank dan penyewa memilih domisili untuk dan tetap di kantor Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan bank tempat SDB disewa.

3. Prosedur Pengakhiran Penyewaan *Save Deposit Box* (SDB)

Setelah dikemukakan mengenai prosedur untuk menjadi nasabah *Save Deposit Box*, syarat-syarat menyewa *Save Deposit Box*, ketentuan-ketentuan penyewaan *Save Deposit Box* (hak dan kewajiban yang timbul antara Bank dengan Nasabah), maka sebagai tahap yang terakhir dalam pelaksanaan tanggung jawab antara Bank dengan Nasabah dalam menggunakan *Save Deposit Box* sebagai salah satu jasa perbankan adalah mengenai prosedur pengakhiran penyewaan *Save Deposit Box*. Dari hasil penelitian pada BNI Kantor Cabang Semarang adalah : ⁴²

1. Nasabah mengisi formulir yang sudah tersedia di bank, yaitu merupakan formulir amanat nasabah yang mana nasabah menyatakan akan menutup *Save Deposit Box* yang disewanya ;
2. Mengembalikan 2 (dua) buah kunci ;
3. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan proses pengakhiran penyewaan *Save Deposit Box*, yakni :
 - a. Penyewa pada saat perjanjian berakhir harus mengosongkan *Save Deposit Box* (SDB) yang disewanya dan menyerahkan kunci yang diterimanya dan apabila tidak dapat menyerahkan penggantian kunci sesuai dengan biaya yang ditetapkan bank.
 - b. Penyewa dalam hal tidak mengosongkan SDB dimaksud, bank tanpa harus memberikan surat peringatan atau pernyataan lalai melalui/diluar pengadilan dalam batas waktu sesuai dengan

⁴² *Ibid*

kepentingan bank berhak mengosongkan, memperbaiki atau memperbarui SDB dan kuncinya serta menahan barangnya sehingga segala kewajiban penyewa diselesaikannya dan semua biaya yang timbul karena hal tersebut menjadi beban dan tanggungan penyewa.

Penyewa dikenakan denda yang ditetapkan oleh pihak bank dari tarip sewa yang berlaku terhitung sejak perjanjian berakhir sampai saat pengosongan.

Namun sampai sejauh ini menurut petugas bank yang ada dalam hal ini petugas *Save Deposit Box*, bahwa pembongkaran *Save Deposit Box* di BNI Kantor Cabang Semarang hal tersebut seperti yang dimaksud di atas belum pernah terjadi.⁴³

- c. Penyewa atau bank sewaktu-waktu tanpa memperhatikan jangka waktu berakhirnya perjanjian dapat mengakhiri perjanjian ini.

Dalam hal pengakhiran dilakukan oleh bank, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran bank akan memberitahukan hal tersebut kepada penyewa. Sebaliknya apabila pengakhiran dilakukan penyewa, maka sisa sewa tidak akan dikembalikan kepada penyewa.

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, mengenai pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam hal ini antara bank dengan nasabah dalam menggunakan *Save Deposit Box* (SDB) sebagai salah satu jasa pelayanan

⁴³ Hasil Wawancara dengan Petugas SDB PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang pada Tanggal 15 Oktober 2003.

perbankan pada BNI Kantor Cabang Semarang di dalamnya terdiri atas 4 (empat) tahap pelaksanaan yang harus dipenuhi, maka dapat diperhatikan bahwa masalah hukum ternyata banyak berkaitan dengan kegiatan operasional bank. Terutama mengenai pelayanan yang diberikan oleh bank atau dalam hal ini adalah pelaksanaan pemberian jasa. Bahwa secara hukum dapat dipastikan adanya penciptaan hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang menimbulkan hak dan kewajiban baik antara nasabah maupun pada bank itu sendiri.

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat diwujudkan dalam suatu perjanjian yang mencakup beberapa syarat/ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dan hubungan hukum tersebut akan timbul dan mengingat pihak-pihak yang terkait setelah diadakan penandatanganan perjanjian oleh pihak yang bersangkutan. Demikian pula dalam mengadakan penyewaan/penggunaan *Save Deposit Box*, bahwa hubungan hukumnya timbul setelah terjadinya perjanjian sewa menyewa antara bank dengan nasabah. Sehingga dari hal tersebut dapat dilihat bahwa hukum dalam hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu perjanjian oleh para pihak yang terkait, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan adanya perlindungan hukum para pihak terutama untuk para nasabah.

Masalah hukum yang banyak berkaitan dengan kegiatan operasional bank adalah pelayanannya pada masyarakat atau calon nasabah terutama dalam hal pemberian jasa, secara hukum sudah pasti menciptakan hubungan

hukum antara kedua boleh pihak. Dengan pengertian dalam hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik pada nasabah maupun pada pihak bank sendiri yang dapat diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab antara bank dengan nasabah tersebut, dari pihak BNI dikemukakan mengenai tanggung jawab yang timbul dari penggunaan jasa pelayanan SDB, seperti yang telah diutarakan di atas bahwa dalam pelaksanaan hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dengan nasabah dapat diwujudkan dalam suatu perjanjian, yang didalamnya mencakup prosedur, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Hubungan hukum yang dapat diwujudkan dalam suatu perjanjian tersebut dapat dibuktikan melalui pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah. Pernyataan ini menegaskan bahwa syarat yang ditetapkan oleh bank diterima oleh nasabah serta nasabah bersedia mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Sedangkan sahnya suatu perjanjian menurut Buku III KUH Perdata Pasal 1320, bahwa diperlukan 4 syarat, yaitu :

- 1) Adanya kata sepakat ;
- 2) Kecakapan bertindak bagi para pihak ;
- 3) Hal tertentu ;
- 4) Sebab yang halal.

Ini berarti jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan/batal demi hukum dari hal tersebut dapat dilihat adanya keharusan

untuk mentaati/melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan peraturan yang berlaku, yang kemudian mengikat para pihak dalam perjanjian itu beserta syarat-syarat yang diperjanjikan.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan/pemenuhan perjanjian tersebut, maka dalam hal ini perjanjian dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk prestasi menurut hal yang dijanjikan, yaitu : ⁴⁴

- 1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang ;
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu dan ;
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Selain ketiga hal tersebut di atas dalam pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dimaksud adalah pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dengan mengingat bahwa dalam suatu perjanjian di dalamnya memuat peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, maka dalam peraturan tersebut harus mengandung tiga aspek yang dikemukakan oleh Radbruch dalam Satjipto Rahardjo yaitu aspek keadilan, kegunaan/kemanfaatan dan adanya kepastian hukum. ⁴⁵

Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum kecuali orang-orang tertentu

⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 36.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 21.

dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan pada dasarnya setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali orang-orang tertentu yang tercantum dalam Pasal 1330 KUH Perdata, adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa ;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;

Demikian juga halnya dalam hal pelaksanaan penggunaan SDB, bahwa setiap orang dapat menjadi nasabah (penyewa) dengan memperhatikan dan mentaati peraturan/ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Apabila ada/timbul kelalaian (tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan) atau yang disebut dengan wanprestasi, yaitu : ⁴⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Atas wanprestasi yang telah dilakukan tersebut ada sanksi/hukuman tertentu yang akan dijatuhkan, yang ditetapkan oleh yang membuat peraturan dan adanya persetujuan dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling menunjang kebutuhan dan menguntungkan satu sama lain dengan adanya rasa saling percaya dan pengertian di antara kedua belah pihak. Sedangkan keterlibatan Hukum

⁴⁶ R. Subekti, *Op. cit*, hlm. 45.

Perdata (Hukum Perjanjian) memberikan petunjuk bagaimana harus membuat perikatan dengan pihak lain agar sah.⁴⁷

4.3. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pelayanan *Save Deposit Box* di Lembaga Perbankan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BNI Kantor Cabang Semarang dalam pelaksanaan tanggung jawab antara bank dengan nasabah sampai sejauh ini selalu lancar dan tidak ada hambatan karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam hal ini penulis mencoba untuk membahas kendala-kendala tersebut secara umum, yaitu kendala-kendala yang terjadi antara bank dengan masyarakat dan secara khusus yaitu kendala yang terjadi antara bank dengan nasabah (penyewa) adalah :

1. Kendala-kendala Umum

Untuk kendala secara umum ini yaitu kendala yang terjadi dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan/penyewaan *Save Deposit Box* adalah tergantung dari pola masyarakat yang ada. Dalam perkembangannya *Save Deposit Box* banyak digunakan oleh masyarakat dari tingkat menengah ke atas karena kebutuhan akan suatu wadah/tempat yang dapat menjamin keamanan dalam penyimpanan barang-barang berharga atau surat-surat berharga mereka.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Pengantar HUMAS*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 18.

Sedang untuk masyarakat menengah ke bawah, hal ini yang masih menjadi kendala dari penggunaan *Save Deposit Box* karena kebanyakan dari masyarakat masih minimnya kesadaran/pengetahuan tentang manfaat *Save Deposit Box*, seperti yang diutarakan oleh Pimpinan BNI Kantor Cabang Semarang.⁴⁸ Sehingga dirasa perlu untuk memberi masukan-masukan pada masyarakat mengenai keuntungan dan manfaat dalam penggunaan *Save Deposit Box*.

2. Kendala-kendala Khusus

Dalam kendala khusus ini yaitu kendala yang terjadi antara bank dengan nasabah (penyewa) berkaitan dengan penggunaan/penyewaan *Save Deposit Box* (SDB), dari hasil penelitian di BNI Kantor Cabang Semarang pada pimpinan BNI Kantor Cabang Semarang dan para nasabah selaku responden, bahwa jarang sekali nasabah yang merepotkan misalnya dalam hal membayar uang sewa dan uang jaminan, hal tersebut karena adanya saling pengertian satu sama lain, sehingga meskipun ada kendala tetapi itu hanya merupakan hal kecil saja seperti yang sering terjadi yaitu terlambatnya menyerahkan photo copy KTP, namun bagi pihak BNI hal tersebut tidak menjadi masalah utama yang penting adalah asal para nasabah/penyewa telah membayar uang sewa dan uang jaminan terlebih dahulu, hal itu dilakukan karena kebanyakan penyewa SDB adalah juga

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang pada Tanggal 13 Oktober 2003.

telah menjadi nasabah dari BNI, sehingga sudah saling kenal/percaya satu sama lain.⁴⁹

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam hal penggunaan pelayanan jasa *Save Deposit Box* (SDB) yang bersifat umum dan khusus dilakukan penyelesaian yang bersifat umum dan khusus pula.

4.3.1. Pemecahan yang Dapat Dilakukan Apabila Menghadapi Kendala Dalam Pelaksanaan Penggunaan *Save Deposit Box* di Lembaga Perbankan

Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penggunaan *Save Deposit Box* antara pihak bank dengan nasabah, dari hasil penelitian dengan responden digunakan cara pemecahan yang hampir sama.⁵⁰ Sehingga dalam hal ini jika terbagi dalam pemecahan umum dan pemecahan yang khusus, maka :

1. Pemecahaan Secara Umum

Cara pemecahan yang digunakan pihak BNI untuk menyelesaikan kendala yang terjadi antara pihak bank dengan masyarakat selaku nasabah adalah kebanyakan melalui penyebaran brosur-brosur. Dari cara-cara pemecahan yang dilakukan pada masyarakat diharapkan masyarakat lebih mengenal manfaat dari penggunaan SDB, terutama bagi masyarakat yang berada di lokasi pemukiman yang rawan akan bahaya kebakaran/kebanjiran.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan para responden yang telah diolah.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan para responden yang telah diolah.

2. Pemecahan Secara Khusus

Merupakan cara pemecahan dari kendala-kendala khusus yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah (penyewa). Dari pihak BNI pada umumnya mengatasi dengan cara mengusahakan agar para nasabah (calon penyewa) mematuhi peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing bank melalui pemenuhan syarat-syarat dan identitas dengan lengkap. Sebagai calon dalam penandatanganan surat-surat bagi nasabah baru (calon penyewa) harus ada di depan (disaksikan) oleh petugas bank. Hal tersebut untuk menghindari adanya penipuan atau kejadian lain yang tidak diinginkan dikemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak dan dari pihak bank sendiri dalam menghadapi hal tersebut harus konsekuen atas janji-janji yang telah ditawarkan yaitu benar-benar melaksanakan penjaminan keamanan atas barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang disimpan. Seperti yang diutarakan oleh petugas SDB, bahwa terdapat tiga hal utama/penting berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa SDB, yaitu :

51

1. Penjamin ;
2. Nilai kunci dan ;
3. Harga.

Dengan melihat kenyataan di atas diharapkan kendala-kendala yang terjadi antara bank dengan nasabah (penyewa) dalam melakukan perjanjian sewa

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Petugas SDB PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang pada Tanggal 13 Oktober 2001.

menyewa SDB dapat teratasi atau dipecahkan, sehingga tidak terjadi adanya kerugian/hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak dikemudian hari.

4.3.2. Manfaat yang Diperoleh dan Prospeknya Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Pelayanan *Save Deposit Box* di Lembaga Perbankan

Tujuan pokok dari aktivitas jasa-jasa perbankan adalah memenuhi berbagai kebutuhan konsumen secara sangat efisien dan menguntungkan, agar pemanfaatan jasa bank meningkat, maka memahami kompleksitas perilaku manusia dan motivasi adalah penting.

Menyangkut perilaku manusia dalam hal ini adalah perilaku masyarakat dan perilaku pihak bank dalam pemanfaatan jasa perbankan, sehingga tujuan tersebut dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Adapun manfaat tersebut antara lain :

4.3.2.1. Manfaat yang Diperoleh Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Pelayanan *Save Deposit Box* di Lembaga Perbankan

Save Deposit Box (SDB) sebagai salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank, mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien dan menguntungkan dalam hal ini penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga

dengan aman dan rahasia. Menurut pihak BNI manfaat dari penggunaan SDB, yaitu pada umumnya : ⁵²

1. Nasabah mempunyai rasa aman apabila menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat berharga di dalam box yang disewa dan dapat dibuka oleh penyewa setiap saat selama jam kerja.
2. Barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang disimpan dapat terhindar dari kerusakan atau pencurian.
3. Dijamin kerahasiaannya, karena adanya pemakaian sistem 2 (dua) kunci (1 kunci master key ada di bank sedang 1 kunci lagi ada di nasabah).

Selain itu box tersebut tidak dapat dibuka tanpa digunakannya kunci tersebut secara bersamaan. Untuk memasuki ruangan/khasanah hanya nasabah (penyewa) yang berhak sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan pada waktu perjanjian dibuat/diadakan. Dari adanya manfaat yang diperoleh dari penggunaan SDB tersebut pihak bank berharap dapat membantu masyarakat secara efisien dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu antara bank dengan nasabah (penyewa). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pendapat dari 20 (dua puluh) orang nasabah (penyewa) SDB pada BNI

⁵² Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang pada Tanggal 13 Oktober 2003.

Cabang Semarang, yang mengatakan bahwa mereka menyadari sepenuhnya kebutuhan akan keberadaan SDB oleh karena keadaan yang dilihat semakin rawan saat ini, yaitu dengan meningkatnya tindak kejahatan di mana-mana serta kejadian alam yang tidak dapat diduga-duga datangnya/dapat terjadi sewaktu-waktu.⁵³ Sedang 10 (sepuluh) responden alasan utama mereka menggunakan SDB adalah untuk menghindari bahaya kebakaran, banjir dan pencurian.⁵⁴ Dari kenyataan di atas dapat dilihat, bahwa penggunaan SDB sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan telah sesuai dengan salah satu tujuan diadakannya jasa pelayanan perbankan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal ini kebutuhan masyarakat.

4.3.2.2. Prospeknya Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Pelayanan *Save Deposit Box* di Lembaga Perbankan

Prospeknya dapat diketahui dengan adanya perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu, terhadap penggunaan *Save Deposit Box* (SDB) dalam hal ini pada pihak BNI setiap tahun ada peningkatan.⁵⁵

⁵³ Hasil wawancara dengan para nasabah pada Kantor BNI Cabang Semarang pada Tanggal 14 Oktober 2003.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang pada Tanggal 13 Oktober 2003.

Jika perkembangan penggunaan SDB dilihat dari target pemasaran, maka pihak BNI mempunyai target serta cara penyelesaian, yaitu :⁵⁶

Bahwa SDB harus dikenal dalam masyarakat luas baik dari masyarakat tingkat bawah, menengah dan atas dengan tarif yang terjangkau. Dalam perkembangan dewasa ini bank telah dapat mencapai target yang direncanakan dan jika target tersebut belum tercapai maka yang dilakukan oleh pihak bank adalah akan merealisasikan lagi serta membenahan perubahan terhadap cara yang selama ini dilakukan.

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh pihak BNI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan penggunaan *Save Deposit Box* (SDB) mengalami peningkatan setiap saat.

⁵⁶ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan uraian hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang penting peranannya dalam masyarakat, yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan di segala bidang. Begitu juga terhadap produk/jasa pelayanan yang ditawarkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Adapun yang mendasari konstruksi hubungan hukum antara pemegang *Save Deposit Box* (SDB) dengan lembaga perbankan, karena adanya pengamanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga baik untuk Warga Negara Indonesia maupun tamu asing.

5.1.2. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* antara pihak bank dengan nasabah sudah pasti menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut melahirkan tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang di dalam perjanjiannya tercantum prosedur, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.

5.1.3. Dalam pelaksanaan penggunaan *Save Deposit Box* terdapat beberapa kendala, di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih ada sebagian masyarakat yang menganggap, bahwa kebutuhan terhadap *Save Deposit Box* masih belum begitu mendesak/penting terutama dalam hal ini pada masyarakat menengah ke bawah.
- b. Masih minimnya tingkat kesadaran/pengetahuan di masyarakat tentang *Save Deposit Box*.
- c. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank masih kurang.
- d. Bahwa penggunaan *Save Deposit Box* masih bergantung pada pola kehidupan masyarakat sekitar yang ada, yakni letak lokasi kantor bank atau pemukiman masyarakat, sehingga pada kota-kota kecil penggunaannya cenderung statis dibanding dengan kota-kota besar yang padat penduduknya.

5.2. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, penulis dapat kemukakan saran-saran sebagai berikut :

5.2.1. Mengingat masyarakat yang menggunakan *Save Deposit Box* masih berasal dari masyarakat tingkat menengah ke atas, untuk itu hendaknya bank lebih memperkenalkan kepada masyarakat akan kegunaan dari *Save Deposit Box* tersebut, terutama pada masyarakat tingkat menengah ke bawah dan sebagai konsekuensinya, agar bank memberikan tarif/harga yang terjangkau oleh masyarakat.

5.2.2. Tujuan pokok seluruh aktifitas jasa perbankan adalah memenuhi berbagai kebutuhan konsumen secara efisien dan menguntungkan. Untuk itu bank hendaknya meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat terutama nasabah dapat merasa aman dalam mempergunakan jasa tersebut.

5.2.3. Mengenai masalah hukum dalam arti terjadinya hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam menggunakan *Save Deposit Box* sebagai salah satu jasa perbankan, yang dapat diwujudkan dalam perjanjian. Hendaknya nasabah dalam pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat/ketentuan yang berlaku/ditentukan oleh bank yang bersangkutan dan pihak bank juga dapat memberi rasa aman dan rahasia atas harta milik yang disimpan oleh nasabah.

RINGKASAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang penting peranan dan fungsinya dalam sektor ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan bank (*Bank Financial Institution*) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta pelayanan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat. Bank juga dalam perkembangannya berfungsi sebagai perantara, pelindung akan barang-barang berharga dan keuangan milik masyarakat.

Peningkatan pelayanan jasa-jasa yang diberikan oleh bank saat ini antara lain : *Travellers Cheque*, *Banknote*, *Credit Card*, Bank Garansi, Penanggung di Bidang Penerbitan Obligasi, *Save Deposit Box*, Penjamin Emisi Efek (*Underwriting*) dan pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya. Salah satu di antara pelayanan jasa-jasa perbankan saat ini yang sering dipergunakan oleh masyarakat demi perlindungan dan keamanan barang-barang berharga miliknya adalah apa yang dinamakan *Save Deposit Box* (SDB).

Adapun yang dimaksud dengan *Save Deposit Box* adalah box yang dilengkapi dengan ruangan tahan api dengan ukuran-ukuran tertentu yang

disediakan oleh Bank untuk kepentingan masyarakat guna menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat berharga miliknya untuk jangka waktu tertentu.

Save Deposit Box sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan dalam penitipan telah diatur dalam undang-undang, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan : "Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut."

Namun dalam prakteknya antara PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Semarang dengan nasabah/masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa *Save Deposit Box* ini yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya menggunakan istilah perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box*. Melihat kenyataan yang ada dalam praktek penggunaan istilah penitipan dalam undang-undang perbankan, kiranya kurang tepat.

Penggunaan *Save Deposit Box* saat ini mulai dipergunakan oleh masyarakat, karena masyarakat membutuhkan adanya perlindungan atas keselamatan dari barang-barang berharga yang dimilikinya.

Kenyataan di atas, menunjukkan bahwa semakin banyaknya masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap keamanan uang dan

barang-barang berharga milik mereka. Oleh karena itu bank sebagai salah satu bentuk usaha yang dipilih dan terpercaya untuk menyimpan barang-barang berharga milik masyarakat hendaknya meningkatkan jasa pelayanannya terhadap masyarakat, khususnya dalam memberikan fasilitas jasa pelayanan *Save Deposit Box*.

Bank menawarkan fasilitas pelayanan jasanya dalam bentuk *Save Deposit Box* adalah sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan dan keamanan atas keselamatan dari barang-barang berharga yang dimilikinya. Namun dalam kenyataannya penggunaan akan jasa pelayanan *Save Deposit Box* ini terkadang masih mengalami berbagai kesulitan atau hambatan, misalnya masih banyak masyarakat awam yang masih ragu dan belum percaya atas penggunaan jasa pelayanan *Save Deposit Box* yang ditawarkan oleh bank, mereka masih takut dan ragu jika barang-barang berharga milik mereka yang disimpan atau dititipkan pada bank akan hilang/rusak jika terjadi kebakaran atau sebab-sebab lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam Bab Ketujuh dari Buku III KUH Perdata berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena "waktu tertentu" bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.

Risiko Dalam Sewa Menyewa

Berkenaan dengan hal ini, ketentuan dalam Pasal 1553 KUH Perdata menyatakan, sebagai berikut :

1. Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum ;
2. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa ataupun ia akan meminta, bahkan pembatalan

perjanjian sewa tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu ia berhak atas suatu ganti rugi.

Walaupun peraturan risiko dalam sewa menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh Pasal 1553 KUH Perdata tersebut, namun dapat berlaku sama dalam perjanjian sewa menyewa *Save Defosit Box* antara bank dengan nasabah.

Pengertian Penitipan

Pengertian atau definisi mengenai penitipan dalam perbankan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Selanjutnya dalam hal penitipan ini bagi Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa di bidang penitipan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 : bahwa usaha Bank Umum meliputi melakukan kegiatan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

Pengertian Lembaga Perbankan

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara

dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan negara.

Adapun menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hubungan Kontraktual Dalam Bentuk *Safe Deposit Box*

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah non debitur dan non deposan. Hubungan kontraktual bank dengan nasabah *Save Deposit Box* biasanya dilakukan selalu secara tertulis.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan mengkombinasikan hasil dari data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dengan data sekunder untuk menemukan dasar hukum/aturan dalam perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* antara Bank dengan Nasabah sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan).

HASIL PENELITIAN

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang penting peranannya dalam masyarakat, yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan di segala bidang. Begitu juga terhadap produk/jasa pelayanan yang ditawarkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Adapun yang mendasari konstruksi hubungan hukum antara pemegang *Save Deposit Box* (SDB) dengan lembaga perbankan, karena adanya pengamanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga baik untuk Warga Negara Indonesia maupun tamu asing.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *Save Deposit Box* antara pihak bank dengan nasabah sudah pasti menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut melahirkan tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang di dalam perjanjiannya tercantum prosedur, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.

Dalam pelaksanaan penggunaan *Save Deposit Box* terdapat beberapa kendala, di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih ada sebagian masyarakat yang menganggap, bahwa kebutuhan terhadap *Save Deposit Box* masih belum begitu mendesak/penting terutama dalam hal ini pada masyarakat menengah ke bawah.
- b. Masih minimnya tingkat kesadaran/pengetahuan di masyarakat tentang *Save Deposit Box*.
- c. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank masih kurang.
- d. Bahwa penggunaan *Save Deposit Box* masih bergantung pada pola kehidupan masyarakat sekitar yang ada, yakni letak lokasi kantor bank atau pemukiman masyarakat, sehingga pada kota-kota kecil penggunaannya cenderung statis dibanding dengan kota-kota besar yang padat penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Anwari, Achmad, 1981, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A., Abdurrahman, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali, A. Hasymi, 1989, *Dasar-dasar Operasi Bank (Terjemahan American Institute of Banking)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota West Publishing Co., USA.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Murniati, Rilda dan Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rai Widjaya, I.G. 2002, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 1987, *Pengantar HUMAS*, Alumni, Bandung.
- Subekti. R., 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, JAKET.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang *Bank Indonesia*.